



ANALISIS KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan PADA PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

Nurfitri Zulaika^{1*}, Adila Afriani², Hasnarika³, Meidi Yanto⁴, & Ranat Mulia Pardede⁵

^{*1-5} Program Studi Akuntansi, STIE Pembangunan Tanjungpinang

*e-Mail: nurfitrizulaika@gmail.com

Submit Tgl: 03-Februari-2026

Diterima Tgl: 05-Februari-2026

Diterbitkan Tgl: 07-Februari-2026

Abstract: *The purpose of this research is to find out what construction activities are being carried out by the Tanjungpinang City government which are contained in the Regional Government Financial Report (LKPD) and to find out whether these planning activities are contained in the Regional Development Plan (RPD). As well as how to overcome it, then look at the year of acquisition, the age of construction in progress and the availability of planning activities in the Regional Development Plan (RPD). The method used by researchers in conducting this research is qualitative. The objects of this research are the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) and the Development Planning, Research and Development Agency (Bappelitbang) of Tanjungpinang City. The types of data used in this research are primary data and secondary data, while the data collection techniques consist of observations, documents and library studies. The results of this research show that the Tanjungpinang City government's construction activities are increasing every year. There is no availability of Construction Under Construction planning activities listed in the overall Regional Development Plan (RPD). And the year of construction activities in progress which is more than ten years of planning in the Regional Government Financial Report (LKPD).*

Keywords: *Construction in Progress; Regional Government Financial Reports (LKPD); Regional Development Plan (RPD); Asset Status*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja kegiatan konstruksi dalam pengerjaan pada pemerintah Kota Tanjungpinang yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan mengetahui apakah kegiatan perencanaan tersebut terdapat di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Serta bagaimana cara mengatasi, kemudian melihat tahun perolehan, usia konstruksi dalam pengerjaan dan ketersediaan kegiatan perencanaan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini kualitatif. Objek penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Tanjungpinang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan datanya terdiri dari obesrvasi/pengamatan, dokumen dan studi Pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan Konstruksi Dalam Pengerjaan pemerintah Kota Tanjungpinang yang meningkat setiap tahunnya. Tidak ada ketersediaan kegiatan perencanaan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) secara keseluruhan. Dan tahun perolehan kegiatan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang lebih dari sepuluh tahun perencanaan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Kata kunci: Konstruksi dalam Pengerjaan; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); Rencana Pembangunan Daerah (RPD); Status Aset.

Cara mengutip Zulaika, N., Afriani, A., Hasnarika, Yanto, M., & Pardede, R. M. (2026). Analisis Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pemerintah Kota Tanjungpinang. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 267–275. <https://doi.org/10.71456/sur.v4i2.1649>

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus pembangunan pemerintah. Pembangunan infrastruktur menimbulkan *multiplier effect* secara sosial dan ekonomi, serta menyerap tenaga kerja. Pemerintah terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Sejumlah sektor diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan investasi nasional, regional, serta ekonomi daerah.

Nilai yang dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan sebesar jumlah yang dibayarkan untuk berbagai biaya yang terkait dengan proses pembangunan. Biaya pembelian bahan dan juga upah gaji yang dibayarkan dalam pelaksanaan pekerjaan secara swakelola pada dasarnya sama dengan jumlah yang dibayarkan kepada kontraktor atas pelaksanaan bagian pekerjaan tertentu. Keduanya merupakan pengeluaran pemerintah untuk mendapatkan aset. Permasalahan utama akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah identifikasi jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi itu dikerjakan.

Pemerintah Kota Tanjungpinang dibangun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang. Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan Kota Tanjungpinang sebagai daerah otonom, memberikan hak dan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan lokal. Dalam peraturan ini, dijelaskan sebagai daerah otonom, Tanjungpinang memiliki kewenangan dalam berbagai bidang pemerintahan, meskipun ada beberapa bidang yang tetap dikelola oleh pemerintah pusat. Kewenangan ini termasuk pengelolaan sumber daya lokal, perencanaan pembangunan, dan penyelenggaraan layanan publik. Kota Tanjungpinang terletak di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Dilihat dari luas wilayahnya, Kota Tanjungpinang hanyalah sebuah kota kecil dengan luas wilayah sekitar 239,5 kilometer persegi dan sebagainya merupakan wilayah perairan laut. Namun dari segi jumlah penduduk, Kota Tanjungpinang masuk dalam kategori kota sedang dengan jumlah penduduk saat ini lebih dari 250 ribu jiwa. Dalam perkembangannya, Kota Tanjungpinang melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai daerah ibukota provinsi. Hal itu menjadikan Kota Tanjungpinang semakin memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh.

Namun di dalam realitanya, belanja modal pembangunan belum dianggarkan dalam satu kesatuan penganggaran belanja modal. Hal ini menyebabkan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) cukup tinggi, padahal kemungkinan rencana pengadaan fisiknya belum masuk dalam rencana pembangunan daerah. Yang membuat laporan keuangan pemerintah menjadi tidak tepat saji sesuai ketentuan dalam pembuatan laporan keuangan dalam akuntansi. Untuk itu penulis

tertarik melihat fenomena ini, dan ingin mengetahui apa saja kegiatan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang tercantum di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Tanjungpinang dan apakah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tersebut sudah memiliki rencana kegiatan fisik yang telah tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Tanjungpinang serta sedikitnya riset terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan juga menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (Armansyah et al., 2025) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari BPKAD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa catatan atas laporan keuangan. Data sekunder adalah data yang diolah oleh badan (lembaga) lain untuk tujuan tertentu dan data olahan tersebut dikumpulkan oleh peneliti sebagai data penelitian bagi peneliti yang bersangkutan (Isa Alamsyahbana dkk, 2023).

Selain data sekunder, jenis data lain yang digunakan yaitu data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data, yang diperoleh melalui observasi di lapangan. Adapun observasi akan dilakukan peneliti dengan tim penyusun LKPD Kota Tanjungpinang di BPKAD dan tim penyusun RPJMD dan RPD di Bappelitbag. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Ini termasuk observasi lapangan, dan data-data mengenai informan. (Sugiyono, 2016).

Untuk keperluan dalam penelitian ini, adapun kegiatan pengumpulan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Dalam studi kepustakaan, penelitian dilakukan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai literatur (buku-buku, jurnal, peraturan undang-undang, dan lain-lain) yang digunakan sebagai acuan berdasarkan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Observasi

Observasi adalah aktivitas pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu objek atau fenomena untuk mendapatkan informasi yang valid dan objektif. Observasi merupakan metode penelitian utama yang digunakan untuk mempelajari perilaku peserta penelitian. Observasi berbeda dengan teknik seperti wawancara atau kuesioner, karena observasi adalah studi tentang apa yang dilakukan subjek.

Pengumpulan Data, merupakan kegiatan utama dari sebuah penelitian dengan mengumpulkan informasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui

observasi dan dokumentasi. Untuk mendapatkan banyak informasi, diperlukan beberapa hari untuk mengumpulkan data. Pada tahap awal, peneliti melakukan kolonisasi terhadap objek sosial secara umum yang diteliti, segala sesuatu yang dilihat dan didengar direkam. Dengan cara ini peneliti memperoleh banyak informasi yang sangat luas dan sangat beragam.

Reduksi data adalah proses pengolahan data yang dilakukan setelah penelitian untuk mengumpulkan data dan menghasilkan informasi yang bermakna dengan menajamkan data, menggolongkan data, mengarahkan data, membuang data yang tidak diperlukan, mengorganisasi data. Reduksi data dilakukan dengan beberapa alat bantu untuk membantu peneliti mencapai tujuan penelitian. Proses reduksi data tidak sekali jadi, melainkan berinteraksi secara berulang dan interaktif. Hasil reduksi data dapat berupa sketsa, sinopsis, matriks, dan bentuk lainnya. Hasil reduksi data yang sudah diolah akan memudahkan dalam pemaparan dan penegasan kesimpulan.

Penyajian Data, adalah menampilkan data penelitian kuantitatif, informasi ini dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram lingkaran, ikon, dan sejenisnya. mewakili data mengatur data dan menyusunnya dalam model relasional, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Dalam penyajian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, sejenisnya. Dengan melihat data, lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan lebih lanjut berdasarkan wawasan tersebut. Selain itu, representasi data disarankan selain teks naratif, juga dapat berupa grafik, matriks, dan bagan. Penyajian data yang efektif dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

Penarikan Kesimpulan, menurut Miles dan Huberman, adalah menarik dan menguji kesimpulan. Kesimpulan awal yang disampaikan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung langkah selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang disajikan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data maka kesimpulan yang disajikan adalah kesimpulan yang masuk akal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan yang dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah atau masyarakat umum. Aset ini mencakup berbagai jenis properti, seperti gedung, jalan, dan jembatan, yang semuanya berperan penting dalam mendukung operasional dan pelayanan publik. Pengelolaan aset tetap yang efektif sangat krusial untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode antar entitas. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah memberikan pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan di lingkungan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan baik keuangan pemerintah daerah maupun laporan keuangan SKPD dalam rangka meningkatkan perbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode,

maupun entitas. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah.

Konstruksi dalam pengerjaan menjadi salah satu kategori aset tetap yang masih dalam proses pembangunan atau pengerjaan yang belum siap digunakan pada tanggal pelaporan. Aset ini mencerminkan pengerjaan yang sedang berlangsung dan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan infrastruktur. Meskipun belum dapat dimanfaatkan secara langsung, proyek konstruksi ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan. Penting bagi pemerintah untuk memantau dan mengevaluasi progres dari konstruksi dalam pengerjaan ini agar dapat memastikan bahwa proyek tersebut selesai tepat waktu dan sesuai anggaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan catatan pada laporan keuangan pemerintah Kota Tanjungpinang, terdapat rincian konstruksi dalam pengerjaan yang dimiliki pemerintah Kota Tanjungpinang tersebar di 14 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp 37.901.402.379 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 SKPD yang memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2023

No	Nama Aset	Nilai
1.	Dinas Pendidikan	605.822.774,00
a.	Dinas Pendidikan	402.393.000,00
b.	TK Negeri Pembinaan 4	15.817.500,00
c.	SMP Negeri 13 Tanjungpinang	98.679.074,00
d.	Sanggar Kegiatan Belajar	24.608.700,00
e.	SD Negeri 004 Binaan Tanjungpinang Barat	29.681.400,00
f.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Timur	9.901.200,00
g.	SD Negeri 014 Tanjungpinang Barat	24.741.900,00
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	824.016.490,00
a.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	186.703.000,00
b.	RSUD Kota Tanjungpinang	637.313.490,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.467.181.009,00
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan	5.156.015.835,00
5.	Dinas Perhubungan	247.115.000,00
6.	Dinas Komunikasi dan Informatika	49.439.500,00
7.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.186.161.395,00
8.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	90.357.330,00
9.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	24.585.000,00
10.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.712.954.046,00
11.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	48.890.000,00
12.	Sekretariat DPRD	239.250.000,00
13.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	99.678.000,00
14.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.149.936.000,00
	Jumlah	37.901.402.379,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Perencanaan adalah suatu proses perencanaan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan menghitung sumber daya yang tersedia. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah dokumen perencanaan jangka menengah sebagai landasan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Rencana pembangunan daerah tahun 2024-2026 dapat dilakukan perubahan dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi

perencanaan dengan kondisi eksisting. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan. Serta dapat terjadinya perubahan yang mendasar. Perubahan rencana pembangunan daerah kota tanjungpinang tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.(Rencana Pembangunan Daerah, 2024).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa permasalahan diklasifikasikan menjadi permasalahan pokok dan permasalahan, serta akar penyebab masalahnya, dimana perumusan masalah dalam dokumen perencanaan dirumuskan dari evaluasi capaian kinerja urusan pemerintahan tahun sebelumnya, dimana Kota Tanjungpinang capaian persentase penyusunan dokumen evaluasi dan pelaporan daerah tepat waktu sudah mencapai 100 persen, sehingga perumusan masalah dalam mendukung perencanaan tahunan menjadi lebih mudah.

Menurut laporan Keuangan Pemerintah kota Tanjungpinang dari 14 SKPD terdapat satu yang memiliki nilai konstruksi dalam pengerjaan tertinggi yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 22.467.181.009,00,- dengan 365 konstruksi dalam pengerjaan mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2023. Nilai konstruksi dalam pengerjaan paling rendah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sebesar Rp. 24.585.000,00,-, hanya terdapat satu perencanaan tahun perolehan 2017 yang masih tercatat hingga saat ini pada LKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2023.

Jumlah ketersediaan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah Kota Tanjungpinang, terdiri dari :

Tabel 1.2 Jumlah Ketersediaan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	SKPD	Jumlah KDP	Ketersediaan di RPD	
			Ada	Tidak
1	Dinas Pendidikan	18	11	7
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	-	3
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	365	276	89
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan	93	52	41
5	Dinas Perhubungan	3	-	3
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	-
7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3	-	3
8	Disas Perpustakaan dan Arsip	1	-	1
9	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	1	-	1
10	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	8	-	8
11	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	1	-	1
12	Sekretariat DPRD	3	-	3
13	Kecamatan Tanjungpinang Kota	1	-	1
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	-	1
Jumlah			340	162

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Dari tahun perolehan konstruksi dalam pengerjaan yang dimulai oleh pemerintah Kota Tanjungpinang, dapat dilihat bahwa banyak dokumen yang tidak tersedia program kegiatannya di dalam RPD. Untuk itu dokumen-dokumen yang program kegiatannya tersedia di dalam RPD, juga belum dapat dipastikan akan dijalankan selama masa RPD atau dalam RPJMD pemerintah yang terpilih ke depan. Konstruksi dalam pengerjaan yang tersedia, juga sudah tidak memenuhi nilai perencanaan yang terkini untuk nilai KDP saat ini. Untuk itu penulis menilai, perlu dilakukan identifikasi konstruksi dalam pengerjaan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang, agar nilai Konstruksi dalam pengerjaan nilai overstatement, atau tidak memenuhi nilai aset tetap yang wajar pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pemerintah Kota Tanjungpinang.

Buletin Teknis Nomor 15 tantang akuntansi aset tetap berbasis akrual, menjelaskan bahwa Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihentikan pengerjaannya oleh karena tidak ketersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu konstruksi dalam pengerjaan dihentikan pembangunannya sementara waktu, maka konstruksi dalam pengerjaan tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan konstruksi dalam pengerjaan direncanakan untuk dihentikan pembangunan secara permanen, maka saldo konstruksi dalam pengerjaan tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada pemerintah kota Tanjungpinang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini :

1. Terjadinya proses atau pelaksanaan perencanaan baru yang membuat nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan bertambah. Sehingga Konstruksi Dalam Pengerjaan selalu mengalami peningkatan nilai pada setiap tahunnya.
2. Penyebab peningkatan perencanaan pada nilai konstruksi dalam pengerjaan karena masih terdapat program kegiatan dari tahun perolehan 2012 yang tercatat di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023. Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat beberapa program kegiatan yang tersedia dan tidak tersedia di Rencana Pembangunan Daerah (RPD), yang belum tentu nilainya sesuai pada saat program tersebut dilaksanakan.

Saran

Terdapat beberapa saran atau upaya-upaya yang perlu dipertimbangkan agar dapat meningkatkan dan mengoptimalkan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Pemerintah Kota Tanjungpinang:

1. Diperlukan pedoman pelaksanaan penyelesaian status konstruksi dalam pengerjaan untuk memudahkan pengidentifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tidak perlu.
2. Perlu adanya penghentian status Konstruksi Dalam Pengerjaan yang di keluarkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan terkait penghentian sementara atau penghentian permanen untuk menjaga nilai akuntabilitas pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pemerintah Kota Tanjungpinang tahun 2023

DAFTAR PUSTAKA

- Armansyah; Atiek Winarti; Bustanul Arifin; Bakri Mallo; Husain T; Endang Lastinawati; Dwi Putranto Riau; Halim Tjiwidjaja; Eka Megawati; Abdul Muis Prasetya; Rochgiyanti; Fathurrahman. (2025). *Metodologi Penelitian* (1st ed.). Padang. Menara Press Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah Periode Februari 2023.
- Heniyatun, I. S. (2023). Insentif Fiskal, Wujud Apresiasi Pemerintah atas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- Isa Alamsyahbana dkk. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (1st ed.). Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Iswanto, D. (2023). Analisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 Dalam Perspektif
- Kebijakan Akuntansi Aset Tetap. (n.d.). Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI,
- Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Pusat. Akuntansi Pemerintahan, 1–213.
- Kewajiban Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Daerah.
- LKPN. (2019). Panduan Langkah Demi Langkah Menyusun Rencana Pembangunan Desa.
- Moleong. (2017). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan.
- Novia Indriani, M. et all. (2023). Perbandingan Antara Rencana Anggaran Biaya Dengan Rencana Anggaran Pelaksanaan Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Villa Lot 3 Natadesa, Jimbaran Hijau).
- Nurhayati., I. A. (2023). Identifikasi Faktor yang Berpengaruh terhadap Penentuan Pemenang Lelang Jasa Konstruksi.
- Ombudsman. (2022). Transformasi Pelayanan Publik Bidang Infrastruktur Harus Mampu Lahirkan Inovasi-Inovasi Baru. Ombudsman RI.
- Ombudsman. (2024). Menggagas Pelayanan Publik di Desa Rasa Kota. Ombudsman RI.
- PSAP 08. (2018). pengetahuan pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 08
- Suhartadi, I. (2024). Pembangunan Infrastruktur yang Masif Berpengaruh Positif ke

Pertumbuhan Ekonomi.

Waridin, juliani et all. (2024). Analisis pelaksanaan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada pekerjaan konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Yusuf, F. M. et al. (2022). Analisis Penerapan Psap Nomor 08 Tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo.